

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk mewujudkan negara yang rakyatnya sejahtera, makmur dan adil merupakan salah satu dari tujuan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dinilai dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera maka perlu peningkatan pembangunan di daerah yaitu dengan cara pemerintah beserta masyarakat mengolah sumber daya yang tersedia dan juga peningkatan kualitas sumber daya manusianya sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan mampu meningkatkan kegiatan ekonomi di kawasan tersebut (Lincoln, 1999).

Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan struktur dan corak kegiatan ekonomi atau modernisasi ekonomi. Jadi pembangunan ekonomi bukanlah hanya masalah perkembangan sektor riil namun juga perubahan pola ekonominya. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan di setiap negara, apabila pertumbuhan suatu negara meningkat maka kesejahteraan masyarakat pasti akan meningkat (Sukirno, 2004).

Pertumbuhan ekonomi yang pesat menjadi harapan, baik ditingkat nasional maupun daerah, masih banyak negara berkembang beranggapan seperti itu, termasuk Indonesia. Tapi, pada tahap awal pertumbuhan ekonomi yang tinggi menyebabkan peningkatan ketimpangan pendapatan. Kondisi ini sesuai dengan kenyataan empiris di negara-negara sedang berkembang yang menunjukkan

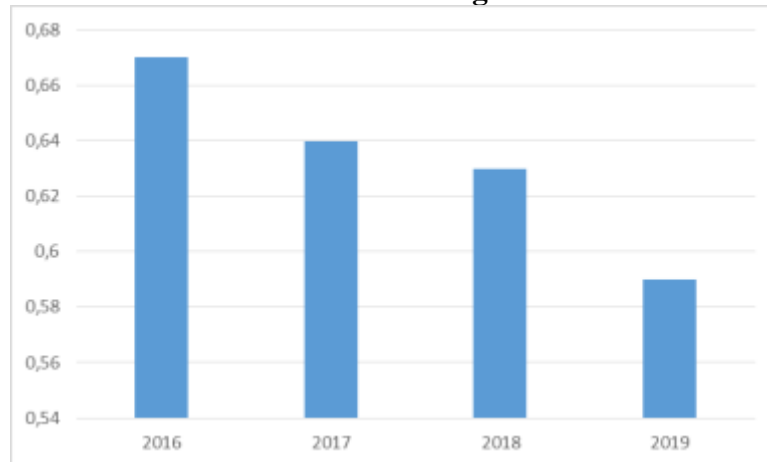
bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat disertai dengan pendapatan yang timpang (Wie, 1981).

Sebagian masyarakat berpendapat bahwa suatu daerah memiliki kesenjangan yang tinggi jika terdapat banyak orang miskin. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa adanya kesenjangan yang tinggi karena adanya sekelompok orang kaya di tengah-tengah masyarakat yang umumnya masih miskin. Menurut M. Kuncoro (2015), ketimpangan pendapatan adalah standar hidup yang relatif pada seluruh masyarakat, karena kesenjangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia. Kesenjangan pendapatan menjadi tanda bahwa distribusi pendapatan di suatu wilayah tidak tersebar secara merata. Pada kondisi ini, pendapatan cenderung dinikmati oleh kelompok kaya, sementara kelompok miskin hanya menikmati pendapatan dalam jumlah sedikit.

Berdasarkan kriteria dari Bank Dunia, berdasarkan penurunan pengeluaran penduduk di Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2017, 40 persen kelompok penduduk miskin mengeluarkan pendapatannya 20,86 persen. Sementara pada tahun 2018 nilainya menurun menjadi 19,81 persen. Pada sisi lain persentase pengeluaran penduduk kaya cenderung terus meningkat dari 39,67 persen di tahun 2017 meningkat menjadi 40,61 persen di tahun 2018. Dengan menggunakan indikator bank dunia maka telah terjadi ketimpangan pendapatan penduduk kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Kebijakan pemerintah dalam mengurangi kesenjangan di setiap provinsi yaitu dengan memperbaiki kualitas

sumber daya manusia yaitu dengan meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender. Dalam penelitian ini akan dihitung indeks wiliamson untuk mengetahui ketimpangan pendapatan menggunakan angka Produk Domestik Bruto (PDRB) di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 35 Kabupaten/Kota yang sangat beragam dari sisi geografis, sosial, dan ekonomi. Berikut perkembangan indeks wiliamson jawa tengah.

Grafik 1.1
Indeks Wiliamson Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2019



Sumber : *BPS Jawa Tengah*

Grafik 1.1 menunjukkan bahwa provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2019 memiliki nilai ketimpangan yang cukup tinggi yaitu 0,64 di tahun 2017 dan 0,60 di tahun 2019, meskipun dalam kurun waktu 4 tahun indeks ketimpangan mengalami penurunan namun nilai ketimpangannya tetap tinggi. Penyebab masih tingginya ketimpangan di jawa tengah karena migrasi penduduk produktif memilih tinggal dan bekerja di daerah berkembang, investasi cenderung berlaku di daerah

yang berkembang. Kebijakan pemerintah cenderung mengakibatkan terkonsentrasinya ekonomi di daerah yang telah berkembang.

Salah satu tanggung jawab pemerintah adalah untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Salah satu cara langsung ialah melalui transfer tunai dan tunjangan dalam bentuk barang. Sejak tahun 1998 di Indonesia, subsidi berupa uang tunai dan tunjangan dalam bentuk barang meningkat, terutama pengeluaran publik untuk kesehatan dan pendidikan. Penelitian yang dilakukan oleh Nugraha & Lewis (2013) bahwa pengeluaran pemerintah pada pendidikan dan kesehatan meningkatkan distribusi pendapatan. Namun subsidi yang diberikan justru memberikan manfaat pada pihak yang terkaya. Jika tujuannya adalah untuk mengurangi ketimpangan pendapatan, pengeluaran pada bidang kesehatan dan pendidikan perlu ditingkatkan lebih lanjut (Hamzah et al., 2017).

Pendidikan saat ini sedang menjadi perhatian yang serius khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dibuktikan dengan adanya kebijakan anggaran dari pemerintah untuk pendidikan. Alokasi dana dari pemerintah pusat untuk provinsi Jawa Tengah mencapai Rp107,05 triliun atau sekitar 4,35 persen dari total APBN tahun 2019. Dari jumlah anggaran yang diberikan, alokasi terbesar di berikan untuk sektor pendidikan yaitu sebesar Rp 10,08 triliun. Anggaran ini digunakan untuk memperbaiki kualitas pendidikan, termasuk peningkatan akses dan pemberian tunjangan profesi guru melalui BOS, dan perbaikan sarana dan prasarana sekolah (Central Bureau of Statistics Republic of Indonesia - Central Java Province, 2020).

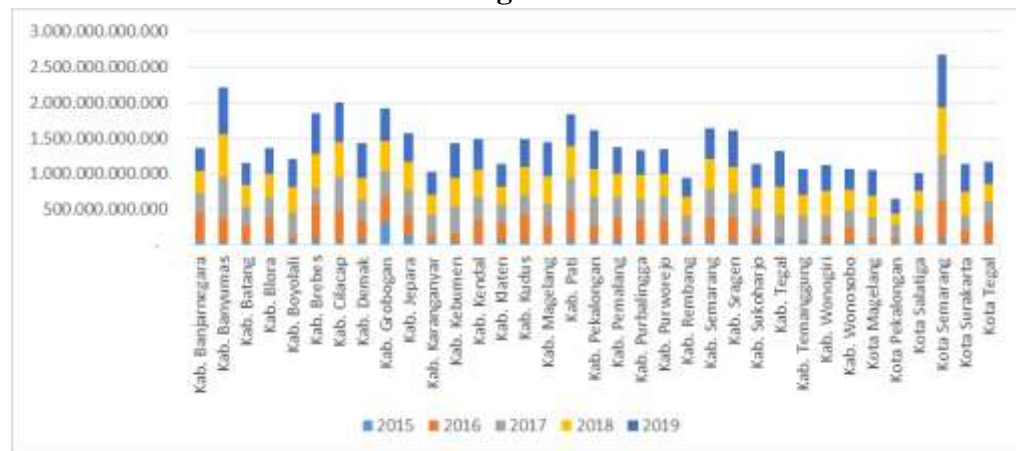
Dengan sistem pendidikan Indonesia yang kompleks, Pemerintah Indonesia berupaya memperbaiki anggaran belanja pendidikan. Semua itu dilakukan untuk menghasilkan lebih banyak masyarakat terdidik, yang bisa berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan yang lebih baik. (Saraswati, 2012)

Salah satu faktor ketimpangan pendapatan juga terletak pada kesehatan masyarakatnya. Salah satu aspek dasar untuk memajukan kualitas hidup manusia ialah pelayanan kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk mengilustrasikan kualitas pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka kegiatan dan proses pembangunan ekonomi di wilayah tersebut akan semakin meningkat. Berbagai program kesehatan telah dilakukan oleh pemerintah salah satunya dengan memberikan kemudahan akses pelayanan publik di bidang kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas. Dari program tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat menjadi lebih baik sehingga dapat meningkatkan produktivitas penduduk dalam mencapai kesejahteraan. Beberapa penelitian menunjukkan ketika masyarakat dalam keadaan sehat maka akan memperoleh upah yang lebih tinggi. Tingginya produktivitas para pekerja yang lebih sehat memungkinkan untuk mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan upah yang tinggi (Todaro, 2011).

Tabel 1.2 memperlihatkan bahwa Pengeluaran Pemerintah di bidang Kesehatan Per Kabupaten/Kota di Jawa Tengah mengalami perkembangan yang

fluktuasi, pada tahun 2015-2019 Kabupaten Grobogan mengalami peningkatan yang terus beranjak naik, pada tahun 2015 sebesar 144 M dan terus naik di tahun 2018 mencapai 464 M. Berdasarkan laporan dari Dinas Kabupaten Grobogan Pengeluaran Pemerintah untuk bidang kesehatan mengalami peningkatan setiap tahunnya karena meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kefarmasian melalui peningkatan sarana prasarana, peralatan di Dinas Kesehatan dan puskesmas RS Grobogan (Grobogan, 2016).

Grafik 1.2 Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019



Sumber : *Kementrian Keuangan*

Kota Semarang memiliki pengeluaran tertinggi dibanding wilayah lainnya di Jawa Tengah yaitu sebesar Rp.2.064.735.459.876.- meningkatnya pengeluaran pemerintah untuk bidang kesehatan di kota Semarang dari tahun ke tahun disebabkan sarana pelayanan kesehatan semakin meningkat jumlahnya karena penduduk yang memanfaatkan fasilitas kesehatan semakin meningkat

jumlahnya seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di Kota Semarang dan kota-kota disekitarnya.

Kesenjangan pendapatan antar perempuan dan laki-laki masih menjadi isu yang diperdebatkan. Berdasarkan hasil survey *World Economic Forum*, Indonesia berada di peringkat yang rendah dalam hal kesetaraan gender. Berdasarkan hasil survey *World Economic Forum* tahun 2016, dalam Global Gender Gap negara Indonesia menduduki posisi ke-88. Di Antara beberapa Negara ASEAN, IPG tertinggi adalah Singapore, Brunai Darussalam, Malaysia, dan Thailand. IPG Indonesia menempati peringkat 110 dari 188 Negara. Isu gender saat ini telah menjadi target di SDGs (*Sustainable Development Goals*). Di goal ke lima, United Nations (UN) berkomitmen untuk meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan gender di seluruh dunia (Schwab, 2016).

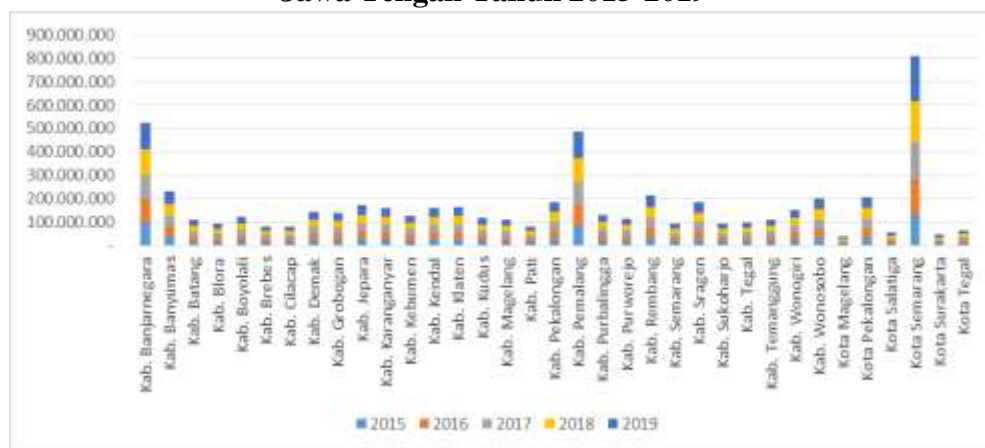
Konsep gender berbeda dengan laki-laki dan perempuan secara biologis. Gender membahas tentang perbedaan peran laki-laki dan perempuan dalam pekerjaan, upah, perilaku dan kegiatan. Dalam perbedaan ini tidak akan menimbulkan masalah jika adanya sikap adil dalam proses kegiatannya, sebab jika tidak adanya sikap adil maka akan menimbulkan kerugian secara sosial maupun psikis baik laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender merupakan hak laki-laki dan perempuan untuk bisa ikut dalam kegiatan apapun dan terbebas dari diskriminasi gender. Berdasarkan data (BPS, 2017) Index Pembangunan Gender (IPG) di Jawa Tengah mengalami fluktuasi di setiap tahunnya. IPG

terendah di tahun 2017 yaitu 83,55 poin di Kabupaten Blora sedangkan angka tertinggi 96,72 poin yang terjadi pada tahun 2019 di Kota Surakarta.

Berdasarkan untuk pengeluaran per kapita yang disesuaikan (ppp) masih terdapat ketimpangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan. Pengeluaran pendapatan perempuan yang tertinggi sebesar Rp14.000 di Kota Salatiga dan yang terendah berada di Kabupaten Pemalang yaitu sebesar Rp 5.702 sedangkan Pengeluaran per kapita laki-laki yang tertinggi sebesar Rp 17.000 di Kota Tegal dan terendah berada di Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp 10.000, ini menunjukkan bahwa masih adanya ketimpangan pengeluaran antara laki-laki dan perempuan di Provinsi Jawa Tengah (BPS, 2019).

Pendapatan Perkapita memiliki peran penting dalam perekonomian. Selain untuk mengetahui kesejahteraan masyarakatnya pendapatan perkapita juga digunakan untuk menentukan kebijakan pemerintah yang tepat kedepannya.

Grafik 1.3 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Jawa Tengah

Tabel 1.3 memperlihatkan bahwa pada kurun waktu 2015-2019 Kota Semarang memiliki PRDB paling tinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan PDRB terendah dimiliki oleh kota Magelang. Kondisi PRDB di kabupaten dan kota di Jawa Tengah berbeda-beda hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Angkatan Kerja, dan Sumber Daya Manusianya.

Ketimpangan dalam suatu daerah terjadi karena adanya perbedaan sumber daya alam, perbedaan kondisi demografi, pendidikan, kesehatan, dan pendapatan perkapita. Perbedaan ini membuat suatu daerah dalam mendorong kegiatan ekonomi juga berbeda, sehingga muncul daerah maju dan daerah tertinggal (Sjafrizal, 2012).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis mengangkat topik dalam penelitian ini dengan judul

“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Kesehatan Gender Gap dan Pendapatan Perkapita Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Jawa Tengah.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2019?
2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2019?

3. Bagaimana pengaruh gender gap terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019?
4. Bagaimana Pengaruh pendapatan perkapita terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2019?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2019.
2. Menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2019.
3. Menganalisis pengaruh gender gap terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019.
4. Menganalisis pengaruh pendapatan perkapita terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2019.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh pemerintah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan dan menyelesaikan masalah terkait perekonomian Indonesia.
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi atau perbandingan di penelitian selanjutnya.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para pembaca yang tertarik dengan perekonomian Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Alat dan Model Analisis

Model yang digunakan dalam penelitian ini merupakan model ekonometrika dengan spesifikasi model sebagai berikut:

$$IW_{it} = \beta_0 + \beta_1 PPBP_{it} + \beta_2 PPBK_{it} + \beta_3 IPG_{it} + \beta_4 PP_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana :

KP = Ketimpangan Pendapatan

$PPBP$ = Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (Milyar)

$PPBK$ = Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan (Milyar)

IPG = IPG

PP = Pendapatan Perkapita (Juta Rupiah)

B_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien Regresi

ε = Unsur Kesalahan (Error term)

i = Cross Section (35 Kab/Kota di Jawa Tengah)

t = Time Series (Periode 2017-2019)

Sumber: Fahrur Hamzah. 2017. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Gender Gap dan Pendapatan Perkapita Terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Ketimpangan Pendidikan Di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*. 6(2):77-96. **Uswatun Hasanah** Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Pendapatan Perkapita dan Pengeluaran Pemerintah

Di Bidang Kesehatan Terhadap Sektor Kesehatan di Indonesia. Jurnal Ekonomi Terapan. 02(1): 31-48.

F. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder sendiri adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, atau melalui media perantara. Pada umumnya data sekunder dapat berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumentasi) yang dipublikasikan maupun data yang tidak dipublikasikan. Data yang penulis peroleh didapat melalui literatur baik dari buku, jurnal, data terbitan instansi tertentu. Penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Data sekunder yang digunakan dalam analisis ekonometrika pada penelitian ini adalah data panel dalam bentuk tahunan. Data time series yang digunakan mulai dari periode 2017-2019. Data cross section meliputi 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Data-Data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Data Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2019.
2. Data Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2017-2019.
3. Data Index Pembangunan Gender di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2019.

4. Data Pendapatan Perkapita di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2019.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dari penulisan ini adalah:

BAB I : LATAR BELAKANG MASALAH

Membahas tentang latar belakang masalah penelitian, menjabarkan beberapa data yang diperoleh dari BPS dan Kemenkeu.

BAB II : PEMBAHASAN

Membahas tentang teori masalah yang sedang dikaji, antara lain pengertian teori terkait pokok bahasan yang dijelaskan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, data dan sumber data, metode penelitian, serta teknik analisa data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan dan menjabarkan tentang deskripsi pengolahan data dengan menggunakan model ekonometrika pembahasan dan hasil analisis data serta intrepetasi ekonomi.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi simpulan berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan. Dalam hal ini juga berisi saran yang direkomendasikan

kepada pihak terkait atas dasar temuan untuk dijadikan bahan referensi atau evaluasi di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN